

FROM PROBLEMATIC VILLAGE TO THEMATIC VILLAGE. EFFORT TO ERASE THE NEGATIVE IMAGE OF KAMPUNG KUNINGAN SEMARANG 1995-2017

Dari Kampung Problematis Menjadi Kampung Tematik.
Upaya Menghapus Citra Negatif Kampung Kuningan Semarang
1995-2017

Dimas Said Fauzan ^{1a(*)} Nina Witasari ^{2b}

¹² Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Semarang

^afauzandimas601@students.unnes.ac.id

(*) Corresponding Author
saidfauzan2607@gmail.com

How to Cite: Dimas Said Fauzan. (2025). Dari Kampung Problematis Menjadi Kampung Tematik. Upaya Menghapus Citra Negatif Kampung Kuningan 1995-2017 doi: 10.36526/js.v3i2.5581

Received : 19-06-2025
Revised : 12-07-2025
Accepted: 17-07-2025

Keywords:
Semarang
Kuningan
Thematic
Change

Abstract

Urban villages are the term for housing or residences of lower-class people in the city. In the city, villages are closely associated with marginalization that grows and develops without normative standards. Villages that are mostly from lower-class communities are often victims of policies, isolated, and even complex about social problems such as slums and crimes committed. One of the villages with these social problems is the Kuningan village located in the city of Semarang. In general, the crimes committed in the Kuningan village form a negative image in the city, the crimes committed are a form of situational crime due to the pressure of fulfilling life's needs. In this study, the main focus is on efforts to eliminate the negative image of the Kuningan village in the city of Semarang in the period 1995-2017. Data collection was carried out by searching for document studies and literature studies. The results of this study provide information about the development of the community and the Kuningan village area of Semarang in dealing with social problems in the period from 1995 to 2017 which has experienced fluctuations in environmental conditions due to both natural and human factors.

PENDAHULUAN

Kota dalam sebagian pandangan oleh orang awam merupakan sebuah tempat tinggal dengan segala kompleksitasnya bagi manusia modern. Kota sebagai sebuah fenomena "urban" memberikan kita lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sangat mempengaruhi dan menentukan preferensi tata perilaku kita (Fahmyddin, 2012). Fenomena urban tersebut nampaknya lazim terjadi di kota-kota besar yang memiliki sektor industri dan ekonomi yang berkembang, salah satunya yaitu kota Semarang. Sejak jaman Hindia Belanda kota Semarang dijadikan sebagai salah satu letak aktivitas perekonomian yang memiliki mobilitas yang tinggi (Tio, Jonkie, 2001). Perkembangan sebagai kota industri kian melejit pasca-kemerdekaan Indonesia. Macam-macam jenis industri seperti otomotif, perbankan, pelayaran, transportasi tumbuh dan berkembang di Kota Semarang (Hartono dan Wiyono, 1985).

Pesatnya Perkembangan industri di kota Semarang tersebut nampaknya beriringan juga dengan meningkatnya jumlah penduduk yang datang ke kota ini dan turut mengadu nasib (Amalia, Purnomo dan Shokheh, 2016). Salah satu gejala yang terlihat di perkotaan pada masa itu adalah kemunculan perkampungan-perkampungan kumuh. Kondisi ini terjadi karena para pendatang tidak memiliki biaya untuk membangun tempat tinggal yang layak, sehingga para pendatang hanya membangun dalam bentuk semipermanent (Wijono, 2013). Perkampungan semipermanent tersebut juga dibangun oleh pemerintah kota guna menampung entitas masyarakat kota yang tidak tercukupi secara ekonomi, perkampungan tersebut dibangun di sekitar kawasan Semarang utara untuk

menampung para gelandangan dan tuna wisma di kota Semarang (Suara Merdeka, 1969). Banyaknya Perkampungan semipermanent yang dibangun di sekitar kota Semarang bagian utara terjadi karena di wilayah Semarang bagian utara merupakan sebuah kawasan yang startegis bagi para pendatang karena letaknya yang dekat dengan berbagai fasilitas kota seperti pelabuhan dan stasiun (Sadyoko, 2014). Perkampungan tersebutlah yang menjadi cikal bakal adanya perkampungan kumuh di Semarang bagian utara.

Lambat laun kawasan pemukiman di Semarang bagian utara ini menyimpan berbagai permasalahan sosial seperti permukiman yang kumuh, citra yang negatif dan kesenjangan kelas sosial. Permasalahan citra negatif tersebut muncul karena adanya daya saing kehidupan sosial ekonomi di kota industri, tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) harus memiliki taraf yang sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, sayangnya tidak semua orang dapat memenuhi standar SDM tersebut (Susanto dan Feren, 2024). Hasilnya munculah individu marginal yang terjebak dalam situasional ekonomi. Mereka yang terjebak dalam situasi tersebut lantas menghalalkan segala cara seperti melakukan tindak kriminal guna dapat memenuhi kebutuhan dan melangsungkan hidup di perkotaan.

Sekitar tahun 1980-an, wilayah Semarang Utara dikenal dengan daerah Hitam, dari 9 kelurahan yang ada, didominasi wilayah kelurahan yang termasuk daerah hitam, yaitu Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Bandarharjo. Kelurahan Kuningan, kemudian Kelurahan Purwosari, Kelurahan Panggung, Kelurahan Bulu Lor. Hampir di semua wilayah kelurahan tersebut ada pentolan gerombolan yang dianggap sebagai momok yang ditakuti di wilayah masing-masing. Mereka saling sesumbar menganggap bahwa dirinyalah yang paling berkuasa (Abdul, 2019). Daerah hitam sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "*lingkungan tempat orang melakukan kejahatan, lingkungan pelacuran dsb*"

Pada tahun 1995 di beritakan dalam surat kabar suara merdeka bahwa tingkat kriminalitas di Semarang Utara Cukup tinggi, hal tersebut diungkapkan oleh Wakapoltabes Semarang Letkol Pol Drs Ign Hari Suprpto (Suara Merdeka, 1996) Hal itu tentunya menjadi aib dan catatan negatif sendiri bagi masyarakat kota khususnya di kawasan Semarang Utara. Dengan adanya hal tersebut masyarakat yang sadar akan pentingnya memperbaiki dan merubah citra suatu daerah tentunya sebisa mungkin melakukan perubahan tersebut. Hal tersebut juga dilakukan oleh warga dari kampung Kuningan di Semarang Utara. Perubahan citra negatif yang ada di kampung Kuningan tersebut mulai nampak dan dilakukan pada tahun 1995 ketika sejumlah pemuda dari Kuningan dan Dadapsari melakukan ikrar pemuda, para pemuda tersebut bertekad menghapus citra Kelurahan Kuningan dan Dadapsari sebagai daerah hitam (Suara Merdeka, 1995).

Pada rentan waktu 1995-2017 kampung Kuningan mulai menampakkan perubahan, banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut untuk merubah citra negatif dari kampung Kuningan (delyus et al., 2023;). Upaya tersebut tentunya juga tak luput dari peran masyarakat dan pemerintah kota Semarang. Peran pemerintah kota yaitu dengan memusatkan perhatian pada kampung-kampung yang memiliki problematik. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam merubah citra kampung Kuningan pun bermacam seperti adanya revitalisasi penanganan permukiman kumuh, perencanaan rencana detail tata ruang kota, serta adanya program kampung tematik di kampung Kuningan (Suriadi et al. (2024). Hingga pada tahun 2017 terbentuklah kampung tematik yang ada di Kuningan dengan tema kampung Ramah Anak.

Perkembangan masyarakat serta daerah di kampung Kuningan dalam menghadapi permasalahan sosial menarik untuk ditulis, sebab dalam rentang waktu dari tahun 1995 hingga 2017 telah terjadi fluktuasi kondisi lingkungan baik diakibatkan faktor alamiah maupun faktor manusiawi. Terdapat kisah-kisah menarik tentang upaya masyarakat Kuningan dan pemerintah dalam menghadapi permasalahan sosial ini. Upaya tersebut tentunya tak luput dari Kerjasama berbagai pihak yang terkait dan yang peduli terhadap permasalahan sosial di suatu wilayah (Wahyuni, 2019;). Lebih jauh, analisis penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadap pembaca

mengenai peran masyarakat serta pemerintah dalam merubah citra negatif kampung Kuningan Semarang dengan sebuah tinjauan historis, sosial dan budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi Pianto (2017). Tahap heuristik dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan arsip meliputi surat kabar sezaman seperti Suara Merdeka. Serta sumber arsip seperti dokumen pemerintahan yang didapat dari Instansi Bappeda kota Semarang. Selain itu penelitian ini juga ditunjang dengan sumber sekunder berupa pustaka kajian-kajian terdahulu. Sumber yang didapat tersebut telah penulis kritisi kevalidannya baik segi internal maupun eksternalnya. Serta sumber sekunder pendukung seperti wawancara yang dilakukan oleh beberapa warga di kampung Kuningan yang menjadi tokoh. Setelah itu dilakukan tahap interpretasi sumber yang kemudian hasilnya penulis tuangkan dalam tulisan ini sebagai wujud dari langkah historiografi Oston & Asri (2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Semarang : Urbanisasi, Munculnya Perkampungan dan Kondisi Sosial Kampung Kuningan.

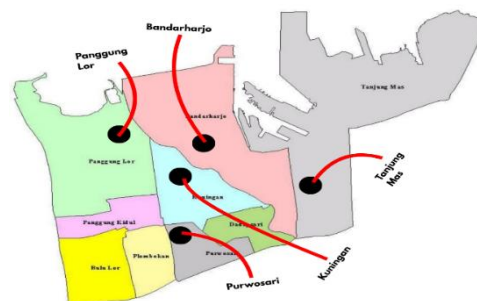
Kota Semarang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Letak kota Semarang yang berada di pesisir utara pulau Jawa ini menjadikan kota Semarang merupakan daerah yang strategis sebagai jalur perdagangan. Pada saat masa kekuasaan Hindia Belanda Semarang bahkan menjelma sebagai kota dengan perekonomian yang cukup maju sejak abad ke-19 (Amalia, Purnomo dan Shokheh, 2016). Dengan pesatnya kemajuan perdagangan dan industri di kota Semarang tersebut, pada awal abad ke 20 an kota Semarang menjadi kota dengan tujuan urban yang cukup tinggi. Dengan tingginya urbanisasi penduduk tersebut mengakibatkan kota Semarang dihuni oleh berbagai etnis didalamnya seperti Jawa, China, Arab, Melayu, India dan Eropa (Wijono, 2013). Para pendatang di Kota Semarang didominasi oleh mereka yang berkemampuan ekonomi dan berpendidikan rendah, sehingga mereka banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan. Salah satu gejala yang terlihat di perkotaan pada masa itu adalah kemunculan perkampungan-perkampungan kumuh. Perkampungan-perkampungan kumuh ini didirikan di atas tanah-tanah kosong milik Pemerintah Kotapraja Semarang. Kondisi ini terjadi karena para pendatang tidak memiliki biaya untuk membangun tempat tinggal yang layak, sehingga para pendatang hanya membangun dalam bentuk semipermanent (Wijono, 2013). Pada masa itu, keberadaan perkampungan-perkampungan kumuh semipermanen yang dihuni oleh para pendatang ini sangat kontradiktif, yaitu di satu sisi merusak pemandangan kota. Akan tetapi, di sisi lain para pendatang yang tinggal di tempat tersebut sangat dibutuhkan tenaganya untuk bekerja di sektor-sektor industri di Kota Semarang sebagai tenaga kerja kasar. Dinamika industrialisasi ini di era Kolonial Belanda harus terhenti sejak pendudukan Jepang pada 1942-1945 (Sadhyoko, 2014). Pasca perang kemerdekaan pada tahun 1950 terjadi kembali gelombang urbanisasi tinggi, urbanisasi yang terjadi di Kota Semarang selain atas dasar ekonomi juga berangkat dari permasalahan di tingkat desa. Indonesia pasca-kemerdekaan tentunya belum sembuh dan stabil dari segi sosialnya terkhusus di kawasan pedesaan yang masih banyak mendapat tekanan-tekanan sosial. Kondisi demikian ini menjadi faktor perpindahan masyarakat desa ke Kota Semarang (Susanto dan Feren, 2024).

Pada 1951 Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan tanah-tanah kosong, maka tanah-tanah di sekitar Kawasan Pelabuhan Semarang mulai bertambah penghuninya (Hartono dan Wiyono, 1985). Hal ini terjadi karena salah satu tanah kosong yang diperuntukan untuk ditempati ada di sekitar kawasan tersebut. Pada dekade 1950-1970-an tanah-tanah di sekitar Kawasan Pelabuhan Semarang banyak diubah menjadi perkampungan-perkampungan padat penduduk. Selain itu, jalur lalu lintas kereta api yang dibangun di sekitar daerah

tersebut banyak yang dibongkar oleh pendatang, tanah-tanah rawa dan tambak banyak pula yang ditimbun dengan sampah oleh para pendatang atas perintah lurah setempat, bahkan alih fungsi lahan kosong sangat marak terjadi pada dekade-dekade ini. Hal ini dapat terjadi karena setelah peraturan pada 1951 disahkan Pemerintah Kota Semarang tidak memberikan kontrol penuh pada penggunaan tanah, sehingga para pendatang menjadi bebas untuk membentuk kampung-kampung baru di sekitar kawasan tersebut (Sadhyoko, 2014).

Terlepas dari hal itu, kota Semarang sebenarnya penuh akan kontradiksi lantaran berbagai hal di kota Semarang dapat dikatakan banyak yang tumbuh secara organik. Hal ini mengacu pada proses perkembangan dan pertumbuhan kota yang terjadi secara alami dan tidak terencana dengan cara terstruktur atau terkendali (Maneka, 2017). Pada era pasca perang kemerdekaan hingga masa orde baru Semarang bagian utara ini menjelma menjadi sebuah wilayah perkampungan yang memiliki berbagai permasalahan sosial seperti kepadatan penduduk, pemukiman kumuh, Citra yang buruk dan kesenjangan kelas sosial. Wilayah perkampungan yang terkesan kumuh pun menjadi fenomena yang khas untuk menggambarkan wilayah Semarang Bagian utara seperti kampung Kuningan, Perbalan, Panggung, Darat, Bonharjo, Tawang Sari, Baru Tikung, dan lain-lain di sekitar Kawasan Pelabuhan Semarang.

Beberapa daerah di kawasan Semarang Utara tersebut juga memiliki beberapa catatan negatif, catatan negatif tersebut muncul karena di daerah tersebut sering kali terjadi tindak kriminal yang sering diberitakan dalam berbagai surat kabar harian. Kampung-kampung seperti Barutikung, Perbalan, Kuningan, Panggung, Tanjung Mas merupakan daerah hitam di Semarang Utara (Fitroh, 2024)



Gambar 1. Peta Semarang Utara Beserta Daerah Hitamnya.
(Sumber : Buku Semarang Utara Dalam Angka 2011 Disertai Dengan Analisis Pribadi Berdasarkan Berbagai Sumber dan Informan)

Daerah-daerah yang dicap sebagai daerah hitam nya kota semarang oleh masyarakat tentunya menjadi problem tersendiri bagi warga di daerah tersebut dan pemerintah kota Semarang. Banyaknya motif kejahatan dan bentrok antar wilayah yang sering terjadi di daerah tersebut yang pada akhirnya membuat nama dari daerah tersebut menjadi buruk di masyarakat, seperti halnya kampung Barutikung, Perbalan, Kuningan, Panggung, Tanjung mas.

Pada kampung Kuningan sendiri yang menjadi fokus penelitian kali ini juga tak luput dari sorotan masyarakat kota mengenai citra yang buruk, kampung kuningan yang terletak di Semarang Utara pada periode tertentu juga menampilkan berbagai hal yang negatif seperti catatan kriminal dan wilayah yang kumuh. Namun pada periode tertentu juga kampung Kuningan mulai menampilkan perubahan yang signifikan terkait dengan citra dan kondisi sosial ekonomi di kampung Kuningan. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang ada kampung Kuningan juga menjadi faktor perubahan citra yang ada di kampung Kuningan, perubahan kondisi sosial tersebut mulai nampak ketika pasca orde baru.

Tahun	Luas tanah	Jumlah penduduk	Jumlah sekolah TK-SLTA	Rumah Semi Permanen	Jumlah rumah permanen	Jumlah Rumah Kumuh	Industri ekonomi	Sarana komunikasi
2008	41,52 Ha	13.877	13	447	2.478	89	12	3.972
2010	44,79 Ha	13.307	13	500	2.478	0	13	3.990
2011	41,52 Ha	13.910	15	501	2.505	4	14	3.990
2012	41,52 Ha	14.424	15	502	2.505	74	14	3.990
2015	41,52 Ha	15.446	15	507	2.441	95	10	3.998
2017	41,52 Ha	15.043	15	502	2.505	74	14	3.990

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Kelurahan Kuningan pasca orde baru hingga tahun 2017
(Sumber : Buku Semarang Utara Dalam Angka 2008,2010,2011,2012,2015,2017, BPS Kota Semarang)

Menurut tabel diatas perubahan naik dan turunnya kondisi sosial ekonomi di kampung Kuningan menjadi tolak ukur tumbuh kembangnya kampung Kuningan. Namun dalam berbagai sektor seperti pemukiman kumuh yang terjadi kenaikan dalam periode tahun tertentu menjadi sebab problematik yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun lapisan masyarakat.

Kampung Kuningan : Histori dan Pembentukan Citra

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sebuah kampung membutuhkan waktu yang lama, sebab kampung memiliki dinamika kehidupan yang cepat berubah dan tidak bisa diramalkan arah perubahannya (Jelinek 1994). Hal tersebut juga dialami oleh peneliti ketika melakukan penelitian historis mengenai kampung Kuningan di Semarang.

Tidak ada yang mengetahui pasti mengenai asal usul kampung Kuningan tersebut, tetapi dijelaskan dalam buku "*Sejarah Sosial Kota Semarang 1900-1950*" diterangkan bahwa ketika kota Semarang ditetapkan menjadi daerah kota Besar Semarang pada tahun 1951, dan pada tahun 1952 ditetapkan melalui SK Gubernur (12 Oktober 1952 No. BSB/ 1952, 1/ I "/11), kota Semarang dibagi ke dalam 5 Kecamatan, dan Kelurahan Kuningan secara administratif masuk ke dalam wilayah Semarang Barat. Meski letaknya yang berada di bagian utara kota Semarang tetapi Kelurahan Kuningan pada era pasca kemerdekaan hingga masa orde baru tahun 90 an masuk ke dalam wilayah administratif kecamatan Semarang Barat. Kelurahan Kuningan yang sekarang ini adalah pemekaran atau penggabungan dari kelurahan Darat Lasimin yang berbatasan dengan kelurahan Kuningan (Rusmeini, 2025) Kelurahan Darat Lasimin sendiri juga merupakan perkampungan yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Semarang Barat yang terletak di bagian utara Semarang yang di sebelah timur berbatasan langsung dengan kelurahan Kuningan (Sudaryo, Suwarno dan Sukandi, 1986) Pada tahun 1992 Kelurahan Kuningan mulai tercatat pertama masuk dalam wilayah Kecamatan Semarang Utara dan Kelurahan Darat Lasimin sudah tidak ada lagi hal tersebut dapat dibuktikan dalam Peraturan Pemerintahan RI No 50 th 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten tingkat II Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II.

Pada tahun 1966 diberitakan dalam koran Suara Merdeka di sekitaran daerah sekitar kelurahan Kuningan di bangun pemukiman untuk menampung para tuna wisma dan gelandangan yang ada di kota Semarang, pembangunan pemukiman tersebut di inisiasikan oleh YYS (Yasasan Sosial Soegijapranata), YYS turut serta memberikan bantuan berupa rehabilitasi tunakarya serta tunawisma dan memberikan subsidi makanan dan memberikan modal dagang (Suara Merdeka, 1966). Program tersebut berlanjut pada tahun 1969, kali ini sebuah permukiman baru dibangun lagi di dekat Kampung Baru Tikung yang letaknya bersebelahan dengan kampung Kuningan oleh Pemerintah Kota Besar Semarang. Permukiman baru tersebut diresmikan oleh Walikota Semarang R. W. Sugiarto dengan nama Ampera. Perkampungan ini termasuk perkampungan terbesar yang dibuat khusus untuk 1.647 orang gelandangan di Kota Semarang (Suara Merdeka 1969). Keberadaan Perkampungan tersebut dengan segala fasilitas hidup yang disediakan ternyata tidak menjamin kehidupan warga yang tinggal di dalamnya menjadi baik. Mereka yang hidup di dalam pemukiman tersebut sebagian besar adalah gelandangan yang menganggur, sehingga sangat sering melakukan aksi-aksi kriminal yang meresahkan warga Semarang dan sekitarnya. Perilaku-perilaku ini membawa dampak yang negatif bagi citra kampung yang berada di sekitarnya. Warga

masyarakat di kampung Kuningan mempercayai bahwa tindak kriminal yang dilakukan oleh warga kampung Kuningan dan sekitarnya ialah berasal dari para gelandangan atau tuna wisma yang terjebak dalam situasi ekonomi yang tidak berkecukupan (Rusmeini, 2025).

Motif tindak kriminal yang dilakukan oleh warga kampung Kuningan ini bermacam-macam dan sering diberitakan dalam surat kabar harian. Seperti halnya yang tercatat dalam suara Merdeka pada tahun 1979 dimana terjadi pengkroyokan yang dilakukan oleh warga Kampung Kuningan. MS Penduduk Kampung Kuningan, Semarang Barat kini menjadi buronan pihak berwajib beserta 2 orang temannya, MS dan rekan-rekannya diduga mengkroyok Suratman salah seorang pamong desa Kuningan (Suara Merdeka, 1979). Pengkroyokan juga terjadi kembali pada tahun 1980, pengkroyokan yang dilakukan oleh warga kampung Kuningan kali ini menggunakan senjata tajam, kejadian tersebut terjadi lantaran korban Bernama Yono tidak memberikan uang keamanan terhadap Ms yang mengaku menjadi keamanan di Kuningan, Yono pun melapor kepada pihak berwajib, Ms yang mengetahui hal tersebut merasa tidak terima dan langsung mendatangi rumah Yono bersama 5 orang rekannya dan langsung menusuk Yono ketika sedang berada di depan rumah (Suara Merdeka, 1980).

Tindak kriminal yang dilakukan warga Kuningan pun juga dilakukan di luar dari wilayah kampung mereka seperti yang tercatat dalam koran suara Merdeka pada tahun 1981 yang dimana warga di sekitaran kampung Kuningan dan Dadapsari melakukan pemerasan di sekitar jalan Tombro yang merupakan Kawasan perbatasan antara Kampung Kuningan dan Dadapsari. Menurut beberapa keterangan dari korban dan para saksi, pelaku sering menjalankan aksinya disertai dengan ancaman pembunuhan menggunakan senjata tajam (Suara Merdeka, 1981). Tindak kejahatan yang terjadi di kampung Kuningan pun juga sering dilancarkan oleh para kaum pemuda atau remaja di kampung tersebut, para pemuda sering terlibat bentrok dengan kampung yang berbatasan. Bentrok paling sering terjadi adalah antara warga kampung Baru Tikung dengan warga Kuningan. Jika saat bentrok terjadi pasti banyak segerombolan orang yang lewat menyusuri kampung dengan membawa alat seperti clurit yang panjang, dan dalam bentrok tersebut antara kampung Kuningan dan Barutikung pasti kedua kampung ini selalu bertemu di jembatan yang menjadi perbatasan kampung Kuningan dan Barutikung, jembatan tersebut saat ini diberi nama jembatan gaza (Rofik, 2025). Dalam penelitian *"Dari 'Kampung Gali' ke 'Kampung Santri' Upaya Perubahan Citra Kampung Baru tikung Semarang 1964-2012"* juga menjelaskan bahwa jika Kampung Barutikung perang dengan kampung Kuningan selalu diawali dengan lempar-lemparan bom Molotov (Sadhyoko, 2014). Kenakalan remaja yang dilakukan oleh warga Kuningan pun turut dirasa sangat meresahkan bagi warganya sendiri, hal ini diungkapkan oleh bapak rofik selaku ketua rw 9 kelurahan Kuningan *"Bocah bocah itu mbien nak podo njagong mesti ono cepak ane"* (Anak anak itu dulu kalau pada nongkrong pasti ada sajiannya/Mirasnya) (Rofik, 2025).

Banyaknya terjadi kriminalitas maupun perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakatnya, terutama mereka yang masih dikategorikan sebagai anak, pelajar, maupun remaja. Bahkan tawuran yang sering terjadi dilakukan dengan warga Kelurahan Bandarharjo, seolah-olah sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan turun temurun. Singkatnya, wilayah Kelurahan Kuningan tadinya adalah wilayah yang memiliki citra buruk (Azmi dan Sunarti, 2020). Citra buruk tersebut tentunya juga berdampak buruk bagi masyarakat di kampung Kuningan, hal tersebut turut di ceritakan oleh Ibu Endah Rusmeini(50) yang dari kecil hidup di kampung Kuningan, beliau bercerita bahwa citra/nama dari kampung Kuningan ini sudah cacat di masyarakat kota, hal tersebut beliau rasakan ketika pada tahun 90 an ketika beliau lulus dari SMA ingin mendaftar pekerjaan di sebuah perusahaan, ketika wawancara terlaksana dan beliau di berikan pertanyaan mengenai alamat asli, ketika menjawab daerah Kuningan pihak perusahaan langsung berpikir dua kali dan ibu Endah Rusmeini di tolak secara halus oleh pihak perusahaan. Beliau juga bercerita bahwasannya untuk mengajukan kredit atau utang piutang ke lembaga lain pun juga pasti akan dipersulit, karena pihak dari peminjam kredit pun juga tidak ingin mengambil resiko dengan warga di kampung Kuningan dan sekitarnya *"Pokoke kene iki bien terkenal senggol bacok"* (Pokoknya daerah sini itu dulu

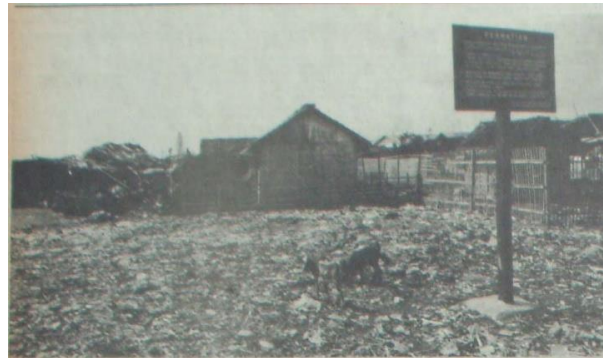
terkenalnya senggol bacok atau kalau ada yang mengganggu langsung dihabisi) (Rusmeini, 2025). Citra negatif tersebut tentunya juga menjadi aib bagi kota Semarang pada waktu itu, ketika pada tahun 1992-1993 ketika diberitakan di koran Suara Merdeka jumlah tingkat kejahatan di kota Semarang mengalami beberapa kenaikan. Ada beberapa kejadian yang termasuk kategori Crime Index yang justru mengalami kenaikan seperti pencurian dengan kekerasan (Curas) termasuk dalam perampokan dan pembunuhan (Suara Merdeka, 1993). Pada tahun 1995 juga diberitakan bahwa tingkat kriminalitas di Semarang Utara Cukup tinggi, hal tersebut diungkapkan oleh Wakapoltabes Semarang Letkol Pol Drs Ign Hari Suprpto *"Semarang Utara memiliki daerah kumuh yang perlu mendapat penanganan bersama, dari situ pula akan muncul peta rawan kriminalitas cukup tinggi dan perlu perhatian"* (Suara Merdeka, 1996). Dengan diberitkannya berita tersebut tentunya berdampak buruk bagi masyarakat di kampung Kuningan, dampak buruk tersebut tentunya menjadikan warga kampung Kuningan mendapat intimidasi buruk dan pengucilan sosial di masyarakat kota. Walaupun dalam berita tersebut tidak dijelaskan bahwa tingginya angka kriminalitas yang terjadi tidak hanya berasal dari kampung Kuningan, tetapi dengan stigma negatif yang ada di masyarakat, warga Kuningan dan sekitaran Semarang utara tetap menjadi sorotan utama. Dengan adanya hal tersebut tentunya Warga Kuningan pun mulai menyadari dan sebaik mungkin dapat memperbaiki citra negatif tersebut dengan berbagai upaya.

Kampung Ramah Anak : Peran Masyarakat Serta Pemerintah Dalam Merubah Citra

Upaya perubahan citra kampung Kuningan yang semula memiliki berbagai problematik dan dicitrakan menjadi kampung tematik yang ramah anak dilakukan oleh masyarakat dan bantuan dari pemerintah melalui berbagai Langkah-langkah yang konkrit seperti halnya penanganan pemukiman kumuh, kegiatan positif yang dilakukan para pemuda dan melalui beberapa program pemerintah yang memfokuskan perhatian terhadap kampung Kuningan.

Upaya perubahan tersebut mulai nampak ketika beberapa pemuda Kuningan yang tergabung dalam KSK (Kelompok Sadar Kamtibmas) Kuningan-Dadapsari melakukan ikrar pemuda. Ikrar pemuda tersebut dicetuskan oleh 125 pemuda anggota KSK (Kelompok Sadar Kamtibmas) Kuningsari. Kelompok pemuda tersebut bertekad menghapus citra Kelurahan Kuningan dan Dadapsari sebagai daerah hitam, para anggota kelompok tersebut bersama masyarakat, aparat dan perusahaan di wilayah tersebut bahu membahu menegakan citra baik dari kampung Kuningan dan Dadapsari. Mereka juga menyatakan akan membuat daerah tersebut yang awalnya merupakan daerah hitam menjadi daerah Pembangunan (Suara Merdeka, 1995). Dengan adanya ikrar pemuda tersebut diharapkan kampung Kuningan dapat merubah citra negatifnya menjadi lebih baik, dan perlahan kampung Kuningan mulai menunjukkan perubahan-perubahan yang mencolok pada era tahun-tahun setelahnya.

Pada tahun 1996 penanganan pemukiman kumuh di kota Semarang mulai di jalankan, pada saat itu Gapensi (Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia) baru Kotamadya Semarang menjadi inisiasi pelaksanaannya. Perbaikan tersebut meliputi beberapa Kecamatan di Semarang, salah satunya yaitu Kecamatan Semarang Utara yang rencana akan membantu 140 rumah kumuh di Kawasan tersebut. Bentuk bantuan yang dilakukan yaitu ada yang dikerjakan langsung oleh Gapensi dan ada pula berupa bantuan dalam bentuk bahan bangunan (Suara Merdeka, 1996). Pada tahun 1997 program tersebut sudah mulai di laksanakan dengan tema Pelestarian dan Pemugaran permukiman kumuh. Gapensi memperbaiki kurang lebih 250 rumah kumuh di Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Utara. Gapensi juga memberikan bantuan berupa pemberian Alquran terhadap masjid-masjid di Kawasan tersebut (Suara Merdeka, 1997). Kampung di Kawasan Semarang Utara memang terkenal akan kekumuhannya, selain penuh dengan sampah yang berserakan, air laut juga sering meluap ke pemukiman penduduk.



Gambar 2. Kondisi perkampungan kumuh di Kawasan Semarang Utara
(Sumber : Pemukiman Kumuh di Semarang Utara, *Suara Merdeka*, 13 Juni 1990)

Pemerintah kota Semarang juga turut membantu dalam upaya penanganan perkampungan kumuh yang ada di kota Semarang khususnya kampung Kuningan, salah satu upaya tersebut ialah Pemerintah kota Semarang pada saat itu merencanakan sebuah program mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang memusatkan perhatiannya pada daerah-daerah kumuh yang ada di kota Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari keluarnya Perda (Peraturan Daerah) kota Semarang No 8 tahun 2004 yang berisi mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Kota (RDTRK) kota Semarang bagian kota wilayah III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) tahun 2004-2010. Wilayah kampung kuningan juga masuk ke dalam RDTRK tersebut, dengan dikeluarkannya perda tersebut pemerintah menambah sarana fasilitas umum dan juga membenahi beberapa fasilitas dan penataan kampung yang tidak beraturan seperti Struktur Tata Ruang Kota, Kependudukan, Pengembangan Kawasan Potensial, Rencana Pemanfaatan Lahan, Sistem Jaringan Transportasi, Kebutuhan Fasilitas, Jaringan Utilitas, Perpetakan Bangunan, Kepadatan Bangunan, Rencana Ketinggian Bangunan, Rencana Garis Sempadan, Rencana Penanganan Bangunan. Program RDTRK yang berlaku dari 2004-2010 tersebut ternyata belum cukup bagi pemerintah kota dalam menangani problem pemukiman kumuh di kota Semarang, maka pada tahun 2014 program tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya SK Walikota Semarang NO.050/801/2014 mengenai penetapan perkampungan kumuh di kota Semarang. Dengan terbitnya SK tersebut tentunya dapat menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan wilayah pemukiman kumuh, dan dapat memfokuskan perhatian untuk membenahi masalah sosial di kampung Kuningan.



Gambar 3. Peta Kawasan Kumuh di Kelurahan Kuningan dan Penangannya
(Sumber : Profil Kawasan Kuningan Kota Semarang NUSP TA 2015, *Kementrian PUPR* 2017)

Upaya tersebut terus berlanjut dengan adanya program dari pemerintah mengenai pembentukan kampung Tematik yang ada di Semarang. Kampung tematik sendiri muncul dan berangkat dari potensi dan masalah yang dihadapi di seluruh kelurahan di Kota Semarang oleh Bappeda Kota Semarang. Tahapan pelaksanaan Kampung Tematik dimulai dari penggalan potensi

dan permasalahan oleh kecamatan, kelurahan dan masyarakat (Widyastuti dan Yuwono, 2016). Kebijakan program kampung tematik yang ada di kota Semarang berawal dari dikeluarkannya SK Walikota Semarang Nomor 050/799/2016 "Penetapan Lokasi dan Tema Kampung Tematik Kota Semarang Tahun 2016. Pada kampung Kuningan sendiri pemerintah memfokuskan program tersebut pada pendayagunaan kampung tematik sehat ramah anak. Sebelum dibentuknya wilayah ramah anak di Kelurahan Kuningan, wilayah tersebut terkenal dengan stigma/citra yang negatif. Hal ini dikarenakan banyak terjadi kriminalitas maupun perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, terutama mereka yang masih dikategorikan sebagai anak, pelajar, maupun remaja. Bahkan tawuran yang sering terjadi, biasanya dilakukan dengan warga Kelurahan Bandharharjo, seolah-olah sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan turun temurun. Singkatnya, wilayah Kelurahan Kuningan tadinya adalah wilayah yang memiliki citra buruk (Azmi dan Sunarti, 2020).

Pada tahun 2017 kampung ramah anak kelurahan Kuningan kota Semarang berhasil terealisasi dengan bantuan atau program yang dicanangkan pemerintah kota sebelumnya lewat perencanaan wilayah kampung tematik di kota Semarang. Latar belakang didirikannya kampung ramah anak karena selama ini belum ada tempat di Semarang yang dapat menampung anak-anak untuk melakukan aktivitas sosial, seperti bermain, belajar, berkumpul dengan teman sebayanya. Kehadiran kampung ramah anak itu diharapkan bisa mendorong masyarakat agar sadar bahwa anak-anak juga butuh bermain dengan kedua orang tuanya maupun teman sebayanya.

Kampung tematik yang ada di kelurahan Kuningan ini tempatnya berada di RW 9 RT 2, dengan tema kampung sehat ramah anak, tentunya dalam penerapan kampung tematik tersebut tak lepas dari hal yang berkaitan dengan permainan anak dan kegiatan belajar. Kegiatan kampung tematik yang ada di Kuningan ini seperti adanya Dokar Bobo (Dolanan Karo Bocah-Bocah), kegiatan dokar bobo ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali hari sabtu jam 4 sore (Rofik, 2025). Permainan yang dimainkan adalah permainan tradisional, hal tersebut dilakukan agar anak-anak disekitaran kampung Kuningan untuk dapat berinteraksi satu sama lain dengan anak-anak lain dan melepas *gadget* mereka (Rofik, 2025). Kegiatan dokar bobo ini juga dilombakan hingga tingkat Kecamatan Semarang Utara, dan pada tahun 2024 bulan Desember Kuningan mendapat juara 3 (Rusmeini, 2025). Kegiatan kampung tematik ini juga dilakukan dengan adanya les bimbel atau bimbingan terhadap anak dari usia balita hingga sd, kegiatan bimbel tersebut dilakukan setiap hari minggu dengan arahan dari YKKs (Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegjapranata). Bimbingan yang dilakukan oleh YKKs tidak hanya kepada anak-anak saja melainkan para kader pkk dari kelurahan Kuningan juga ikut dibimbing mengenai sistem belajar terhadap anak yang baik dan benar. Penerapan kampung ramah anak tersebut juga diberikan pemerintah dengan dibuatkannya area taman bermain anak dan taman baca anak (Rusmeini, 2025). Dengan adanya berbagai program dari kampung tematik ini bapak Rofik dan Bapak Yoga selaku penanggung jawab kampung tematik dari Kelurahan turut mengungkapkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya kampung tematik tersebut sangat besar dalam merubah citra kampung Kuningan (Yoga, 2025). Kampung Kuningan yang dulu terkenal dengan citra negatifnya saat ini sudah tidak seperti dulu lagi, walaupun tidak sepenuhnya hilang, tapi intensitas tindakan kenakalan remaja mulai berkurang dan kampung Kuningan selalu menunjukkan perkembangan terus kearah yang lebih baik, seperti anak-anak nongkrong tidak jelas dan bawa miras, ngelem disekitar kantor kelurahan sekarang sudah tidak dijumpai lagi (Rofik, 2025).

Dengan adanya kampung tematik ramah anak dengan berbagai programnya yang dijalankan setiap minggunya menjadikan anak usia dini lebih memiliki tempat yang layak sebagai seorang anak, kampung yang dulu terkenal akan maraknya tindak kriminal dan kenakalan anak kini berubah menjadi kampung yang memiliki citra ramah anak. Perlahan namun pasti, stigma negatif yang dialamatkan kepada wilayah Kelurahan Kuningan, perlahan mulai dihapus dengan hadirnya konsep wilayah ramah anak. Seperti pemberian fasilitas kepada anak, secara tidak langsung

pembentukan wilayah ramah anak yang mulai diterapkan di RW IX Kelurahan Kuningan turut menurunkan angka kenakalan yang dilakukan anak di wilayah tersebut.

PENUTUP

Perubahan citra Kampung Kuningan dari kampung yang awalnya penuh problematik seperti perkampungan yang kumuh dan kriminalitas yang ada menjadi sebuah kampung Tematik yang ramah anak menjadi penting bagi warga penghuni kampung karena adanya keinginan untuk diterima kembali secara wajar oleh masyarakat luas. Pembentukan citra baru tersebut diupayakan oleh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kampung Kuningan sendiri dan berbagai Langkah program yang konkrit dari pemerintah. Upaya seperti ikrar pemuda, kegiatan positif para pemuda, penanganan pemukiman kumuh oleh pemerintah dan pembentukan kampung tematik ramah anak menjadi momentum bagi kampung Kuningan untuk kembali menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini kemudian menyebabkan perubahan citra masyarakat di kampung Kuningan. Walaupun pembentukan wilayah ramah anak tidak menghilangkan keseluruhan kenakalan atau kriminalitas, namun pembentukan wilayah ramah anak di Kelurahan Kuningan bisa meminimalisir kenakalan atau kriminalitas anak. Dengan demikian, akan terbentuk generasi baru yang menjadi pemutus mata rantai kenakalan atau kriminalitas yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu program ini dapat dijadikan sebagai pemutus mata rantai kenakalan atau kriminalitas yang dilakukan anak, yaitu dengan membentuk sebuah generasi baru yang berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. (2016). KOMUNITAS MASYARAKAT PESISIR DI TAMBAK LOROK, SEMARANG. *Sabda Volume 11, Nomor 2*.
- Adinda, F. D. (2024). Perilaku dan Sikap Karakteristik serta Ekonomi Masyarakat Pesisir di . *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2*.
- Ambariyanto, D. (2012). Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang. *Jurnal Riptek Vol.6 No.II, 29*.
- A'raaf, T. F. (2012). Perencanaan Kota Ramah Bencana. *Alayuddin University Press*.
- Arif, A. (2019, Desember 6). *Semarang utara dulu dikenal sebagai daerah hitam*. Retrieved from Ayo Semarang: <https://www.ayosemarang.com/netizen/pr-77780907/Semarang-Utara-Dulu-Dikenal-sebagai-Daerah-Hitam>
- Fitroh, N. (2024, Juni 12). *Lokasi Favorit Tawuran, Jembatan Di Kota Semarang Ini Kerap Dijuluki Jalur Gaza*. Retrieved from espos regional : <https://regional.espos.id/lokasi-favorit-tawuran-jembatan-di-semarang-ini-kerap-dijuluki-jalur-gaza-1940410>
- Cyndiana Pawestri, M. M. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2 (NUSP-2) DI KELURAHAN KUNINGAN, KOTA SEMARANG. *Jurnal Pengembangan Kota Vol 7 No 1*.
- delyus, r., Anggreta, D., & Rahmadani, S. (2023). Partisipasi masyarakat dalam program kotak menggunakan gagasan g.c. homans di pasar pandan air mati, kota solok. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (Jisp), 4(2)*. <https://doi.org/10.30596/jisp.v4i2.16040>
- Hafzhi Nur Azmi, S. S. (2020). KEBERLANJUTAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN KUNINGAN KOTA SEMARANG. *Jurnal Riptek Vol 14 No 1*.
- Ir RA Laksmi Widyawati, M. (2023). Arsitektur Kota Berkelanjutan. *Universitas Borobudur, 4-37*.

- Joseph, S. A. (2014). "Dari "Kampung Gali" ke "Kampung Santri" Upaya Perubahan Citra Kaampung Baru tikung Semarang. *Universitas Diponegoro*.
- Lestari, S. (2019). PROGRAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KAMPUNG RAMAH ANAK KELURAHAN KUNINGAN KECAMATAN SEMARANG UTARA. *Universitas Negeri Semarang*.
- Makelo, I. D. (2017). Sejarah Perkotaan:Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis. *Lensa Budaya*, 83-101.
- Maneka Budiman, P. (2017). Memahami Evolusi Budaya Urban. *Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia*, 16-30.
- Mu'adz, S. (2022). Peran sosial Kh. R.Syamsuddin di Kelurahan Bandarharjo 1964-2014. *IAIN Salatiga*, 30.
- Muhammad Ifar Aryaputra, D. T. (2017). EFEKTIVITAS WILAYAH RAMAH ANAK DI KELURAHAN KUNINGAN, SEMARANG UTARA, KAITANNYA DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN ANAK. *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 19, No. 2.
- Muhammad, S. (2019). KEKUMUHAN DI PERKAMPUNGAN NELAYAN TAMBAK LOROK KOTA SEMARANG 1970-1993. *Universitas Diponegoro*.
- Pianto (2017) Pianto "PENTINGNYA PENULISAN SEJARAH LOKAL DI PACITAN TAHUN 1999-2014" Sosiohumaniora jurnal ilmiah ilmu sosial dan humaniora (2017)
doi:10.30738/sosio.v2i2.553
- Rizky Amalia, A. P. (2016). Kampoengverbetering dan perubahan sosial masyarakat gemeente Semarang tahun 1906-1942. *Journal of Indonesian History*.
- Rizka Nuri Widiastuti, D. D. (2019). Inovasi Kampung Tematik di Kota Semarang, Pembangunan Kawasan Kumuh Berbasis Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Sehat Ramah Anak). *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 8, no. 03.
- Saputri, A. N. (2020). Analisis Faktor-faktor Kenakalan Remaja di Kampung Barutikung Semarang. *Universitas Negeri Semarang*, 50.
- Septian, E. (2024). Masalah dan Pengecualan sosial masyarakat kampung barutikung dalam cerpen "Gelang sipaku Gelang" karya Yusi Avianto Pareanom. *Jurnal Aksara*, 15.
- Susanto Jumaidi, F. F. (2024). Gelandangan kepung kota Semarang1950-1964:kedatangan, kehidupan,dan penanggulangan. *Historia Madania Volume 8(1)*.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: menuju pembangunan berkelanjutan di indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1).
<https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Wahyuni, D. (2019). Pengembangan desa wisata pentingsari, kabupaten sleman dalam perspektif partisipasi masyarakat. *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 91-106.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1386>
- "Jajasan Sosial Sugijapranata Dirikan 214 Rumah Untuk Para Tunawisma", *Suara Merdeka* 7 November 1966
- "1647 Gelandangan Kota Semg, Skg Sudah Dapatkan Tempat Berteduh", *Suara Merdeka* 5 Mei 1969
- "Gara2 Sepeda Hilang, Pamong Desa Kuningan Smg Dikroyok", *Suara Merdeka* 27 September 1979

- "Korbannya Kebal Senjata", Suara Merdeka 12 November 1980
 "Pelaku Pemerasan di Jln Tombro Diamankan: Residivist" Suara Merdeka 1 Juni 1981
 "Pemukiman Kumuh di Semarang", Suara Merdeka 13 Juni 1990
 "Selama 1992 Ada Kenaikan Beberapa Kasus Kejahatan" Suara Merdeka 6 Februari 1993
 "Pemuda Kuningan-Dadapsari Berikrar Hapus Daerah Hitam" Suara Merdeka 25 Februari 1995
 "Wakapoltabes : Tingkat Kriminalitas di Semarang Utara Cukup Tinggi", Suara Merdeka 16 Februari 1996
 "Gapensi Siap Tangani Rumah Kumuh", Suara Merdeka 9 Desember 1996
 "Gapensi Pugar 250 Rumah Kumuh", Suara Merdeka 10 Maret 1997
 "Warga Bandarharjo-Kuningan Sepakat Tak Saling Balas Dendam" Suara Merdeka 19 Maret 1999
- PERDA Daerah kota Semarang No 8 Tahun 2004 "*Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota III*" (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 2000-2004.
 - SK Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 "*Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang*
 - SK Walikota Semarang Nomor 050/799/2016 "*Penetapan Lokasi dan Tema Kampung Tematik Kota Semarang Tahun 2016*"
 - PP Pemerintah Republik RI No 50 th 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten tingkat II Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II.
- Wawancara Yoga (32), 14 Mei 2025 "Ketua Rt 2 Rw 9 sekaligus ketua Pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuningan"
 - Wawancara Rofik (49), 14 Mei 2025 "Ketua Rw 9 sekaligus Pembina Kegiatan Program Kampung Tematik Kuningan"
 - Wawancara Endah Rusmeini (50), 14 Mei 2025 "Ketua Pkk RW 9 Sekaligus warga asli Kuningan Sejak Kecil